

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan*. (Dalam Sektor Pelayanan Publik). Jakarta. Sinar Grafika.
- Bachsan Mustafa. 1990. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan. 2007. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Jogjakarta. FHUII Press.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- E. Utrecht. 1957 *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta.
- E. Utrecht dan Moh. Djinjang. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta. Balai Buku Ichtiar.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta
- Khairani. 2015. Disertasi :Kepastian Hukum Hak Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau Dari Pengaturan dan Konsep Hubungan Kerja Dalam Hukum Ketenagakerja. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B.M Sidharta. 2000. *Pegantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni.
- Mr. N. M. Spelt dan Mr.J.B.J.M. Ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya. Yuridika.
- Prajudi Atmosudirjo. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. MA. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers.

Riduan Syahrani. 2014 *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni.

Salim HS. 2012. *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta Timur. Sinar grafika.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.

Suroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Tahkdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan kedua. Jakarta. Rajawali Pers.

Utrecht. 1998. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di

Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011 – 2031.

**C. Website**

Esdm.go.id

Pertambangan.<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-hukum-pertambangan-dan-ruang.html>.

